

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kota Malang**

Wilayah cekungan Malang telah ada sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti (misalnya Prasasti Dinoyo), bangunan percandian dan arca-arca, bekas-bekas fondasi batu bata, bekas saluran drainase, serta berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan.

Nama "Malang" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal usul nama "Malang". Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal usul nama Malang tersebut.

Malangkuçeçwara (baca: Malangkusheshwara) yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang. Namun demikian dimana letak sesungguhnya bangunan suci Malangkuçeçwara itu, para ahli sejarah masih

belum memperoleh kesepakatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang dimana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, di sebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang.

Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang. Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malangsuka, yang oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malankuça (baca: Malankusha) yang diucapkan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari.

Dari kedua hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan manakah kiranya yang terdahulu dikenal dengan nama Malang yang berasal dari nama bangunan suci Malangkuçeçwara itu. Apakah daerah di sekitar Malang sekarang, ataukah kedua gunung yang bernama Malang di sekitar daerah itu. Sebuah prasasti tembaga yang ditemukan akhir tahun 1974 di perkebunan Bantaran, Wlingi, sebelah barat daya Malang, dalam satu bagiannya tertulis sebagai berikut : “..... taning sakrid Malang-akalihan wacid lawan macu pasabhanira dyah Limpa Makanagran I .....”. Arti dari kalimat tersebut di atas adalah : “ ..... di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang bersama wacid dan mancu, persawahan Dyah Limpa yaitu .....” Dari bunyi prasasti itu ternyata Malang

merupakan satu tempat di sebelah timur dari tempat-tempat yang tersebut dalam prasasti itu. Dari prasasti inilah diperoleh satu bukti bahwa pemakaian nama Malang telah ada paling tidak sejak abad 12 Masehi.

Nama Malanguḥwara terdiri atas 3 kata, yakni mala yang berarti kecurangan, kepalsuan, dan kebatilan; angkuḥa (baca: angkusha) yang berarti menghancurkan atau membinasakan; dan Iḥwara (baca: ishvara) yang berarti "Tuhan". Sehingga, Malanguḥwara berarti "Tuhan telah menghancurkan kebatilan".

Hipotesa-hipotesa terdahulu, barangkali berbeda dengan satu pendapat yang menduga bahwa nama Malang berasal dari kata "Membantah" atau "Menghalang-halangi" (dalam bahasa Jawa berarti Malang). Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang.

Timbulnya Kerajaan Kanjuruhan tersebut, oleh para ahli sejarah dipandang sebagai tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan yang sampai saat ini, setelah 12 abad berselang, telah berkembang menjadi Kota Malang. Setelah kerajaan Kanjuruhan, pada masa emas kerajaan Singasari (1000 tahun setelah Masehi) di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur, banyak penduduknya serta tanah-tanah pertanian yang amat subur. Ketika Islam menaklukkan Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih Majapahit melarikan

diri ke daerah Malang. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang merdeka, yang oleh putranya diperjuangkan menjadi satu kerajaan yang maju. Pusat kerajaan yang terletak di kota Malang sampai saat ini masih terlihat sisa-sisa bangunan bentengnya yang kokoh bernama Kutobedah di desa Kutobedah. Adalah Sultan Mataram dari Jawa Tengah yang akhirnya datang menaklukkan daerah ini pada tahun 1614 setelah mendapat perlawanan yang tangguh dari penduduk daerah ini.

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya "Ijen Boulevard" dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana.

Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah "Gemente" (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan ; "Malang namaku, maju tujuanku" terjemahan dari "Malang nominor, sursum moveor". Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi : "Malangkuçeçwara". Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng.

Poerbatjaraka, karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal usul kota Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malanguceçwara.

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

- a. Tahun 1767 Hindia Belanda memasuki kota
- b. Tahun 1821 kedudukan pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
- c. Tahun 1824 Malang mempunyai asisten residen
- d. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat dan kota didirikan dan alun-alun dibangun.
- e. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai kotapraja
- f. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
- g. 21 September 1945 Malang masuk wilayah Republik Indonesia
- h. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
- i. 2 Maret 1947 pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
- j. 1 Januari 2001 menjadi Pemerintah Kota Malang.

## **2. Gambaran Umum Kota Malang**

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata Kota Malang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

## **2. Lambang Kota Malang**

DPRDGR mengukuhkan lambang Kotamadya Malang dengan Perda No. 4 Tahun 1970. Bunyi semboyan pada lambang kota adalah "MALANG KUÇEÇWARA". Semboyan "MALANG KUÇEÇWARA" berarti Tuhan menghancurkan yang jahat, menegakkan yang benar.



**Gambar 2: Lambang Kota Malang**

Sumber: Wikipedia, Diakses 2017

Berikut ini adalah arti warna dalam logo Kota Malang:

- a. Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia
- b. Kuning, berarti keluhuran dan kebesaran
- c. Hijau adalah kesuburan
- d. Biru Muda berarti kesetiaan pada Tuhan, negara, dan bangsa
- e. Segi lima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Semboyan tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya Kotapraja Malang pada 1964. Sebelum itu, semboyan yang digunakan adalah

"MALANG NAMAKU, MAJU TUJUANKU" yang merupakan terjemahan dari semboyan berbahasa Latin, yaitu "MALANG NOMINOR, SURSUMMOVEOR" yang disahkan oleh Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027. Semboyan baru itu diusulkan oleh Prof. DR. R. Ng. Poerbatjaraka dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada zaman Ken Arok.

### **3. Letak Geografis Kota Malang**

Kota Malang letaknya sangat strategis yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, dengan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Klojen. Lokasi ini secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  -  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan luas keseluruhan wilayahnya seluas 110.06 km<sup>2</sup>. Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan dengan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Klojen, yang dibagi lagi menjadi 57 kelurahan.

Secara administratif wilayahnya dibatasi oleh batas-batas administrasi daerah disekitarnya, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang Kabupaten Malang.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji Kabupaten Malang.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau Kabupaten Malang.

### **4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang (BPKAD)**

- a. Sejarah Pembentukan BPKAD

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, tepatnya berada di belakang kantor Balai Kota Malang. Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dimulai pada tahun 2012. Legalitas pembentukan dan operasional SKPD ini didasarkan pada peraturan walikota sebagai berikut:

- 1) Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- 2) Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

b. Struktur Organisasi BPKAD

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kota Malang telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Atas dasar ketentuan tersebut yang semula Dinas Perumahan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan digabung menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, mengingat beban tugas yang semakin berat dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah secara umum maka

Organisasi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu ditunjang dengan Jabatan Struktural yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga beban tugas kedinasan dapat dilaksanakan secara merata oleh pejabat struktural yang mengemban.

Struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Subbagian Penyusunan Program.

2) Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Umum.

c. Bidang Anggaran, terdiri dari:

1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.

2) Subbidang Administrasi Anggaran.

d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari :

1) Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas.

2) Subbidang Akuntansi.

e. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari :

1) Subbidang Pendataan dan Evaluasi Aset Daerah.

2) Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah.

f. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari :

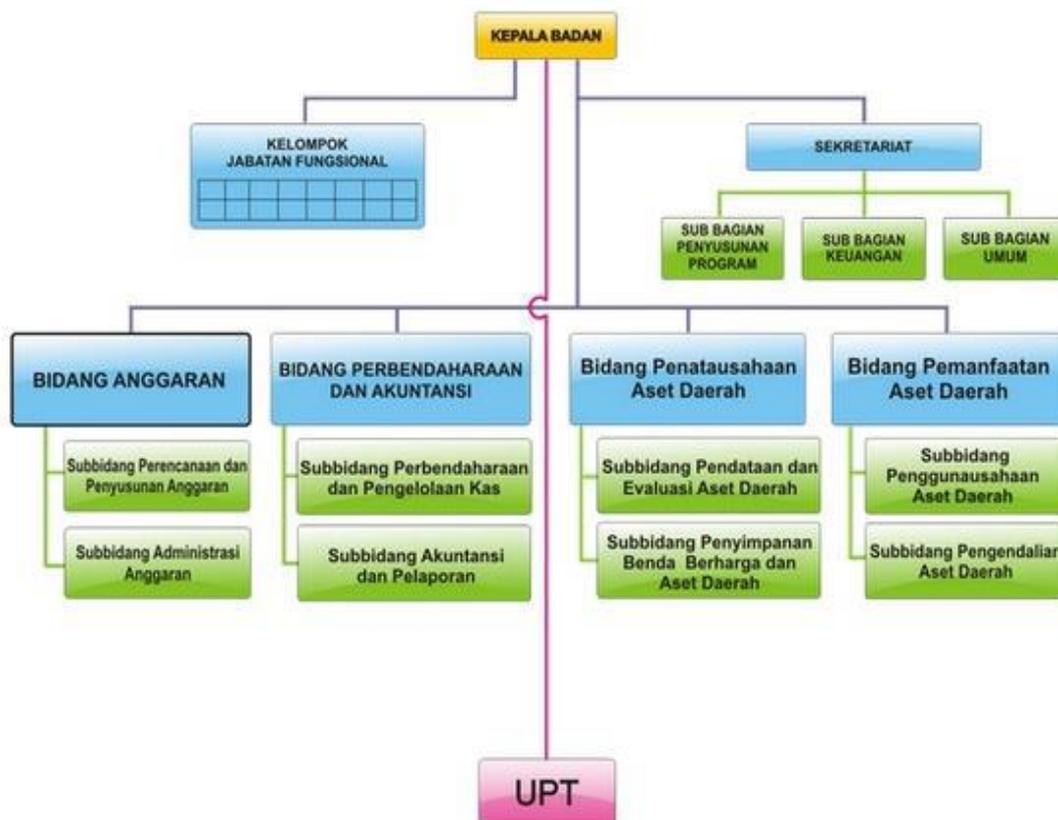
1) Subbidang Penguasaan Aset Daerah.

2) Subbidang Pengendalian Aset Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara visual struktur organisasi tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



**Gambar 3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Malang**  
Sumber: BPKAD Kota Malang

## B. Penyajian Data

### 1. Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2016

Pendapatan daerah adalah hak pemerintahan daerah yang menambah kekayaan daerah tanpa harus dibayar lagi oleh daerah. Pendapatan daerah juga merupakan bukti adanya desentralisasi fiskal yang disebabkan oleh otonomi daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari internal maupun eksternal pemerintahan

daerah. Internal berarti diperoleh dari dalam pemerintahan daerah atau dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari eksternal atau luar pemerintahan daerah contohnya pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari daerah lain. Ataupun sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber pendapatan daerah Kota Malang adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sebagai daerah otonom adalah PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Malang pada tahun anggaran 2013-2016 dapat ditunjukkan dalam Tabel 5:

**Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah kota Malang TA 2013-2016**

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2013	Pendapatan Asli Daerah	298.417.399.028,-	317.850.423.684,-
	Dana Perimbangan	1.137.539.547.973,-	1.164.375.000.745,-
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	49.365.145.000,-	42.621.145.000,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.485.322.092.001,-</b>	<b>1.524.846.569.429,-</b>
2014	Pendapatan Asli Daerah	347.817.577.770,-	372.545.396.292,-
	Dana Perimbangan	1.299.435.489.802,-	1.329.108.236.363,-
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	86.932.057.000,-	63.211.057.000,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.734.185.124.573,-</b>	<b>1.764.864.689.655,-</b>
2015	Pendapatan Asli Daerah	363.978.160.111,-	424.937.346.938,-
	Dana Perimbangan	1.438.480.451.121,-	1.389.352.934.193,-
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	74.400.000.000,-	14.781.000.000,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.876.858.611.232,-</b>	<b>1.829.071.281.131,-</b>
2016	Pendapatan Asli Daerah	387.431.571.214,-	477.541.556.464,-
	Dana Perimbangan	1.292.967.091.635,-	1.251.246.694.245,-

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	55.000.000.000,-	12.606.000.000,-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.735.398.662.849,-</b>	<b>1.741.394.250.709,-</b>

Sumber: BPKAD Kota Malang, 2017

## 2. Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah, merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah/daerah itu sendiri. Adapun data PAD Kota Malang tahun 2013-2016 dapat ditunjukkan dalam Tabel 6.

**Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2013-2016**

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
2013	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>298.417.399.028,-</b>	<b>317.772.985.191,-</b>
	Pajak Daerah	210.287.899.778,-	238.499.748.161,-
	Retribusi Daerah	38.366.632.198,-	38.460.785.953,-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	21.551.938.094,-	16.571.050.907,-
	Lain-lain PAD yang sah	28.210.928.956,-	24.241.400.169,-
2014	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>347.817.577.770,-</b>	<b>372.545.396.292,-</b>
	Pajak Daerah	260.000.000.000,-	278.885.189.548,-
	Retribusi Daerah	40.345.709.448,-	45.557.675.300,-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	11.703.610.469,-	13.385.924.500,-
	Lain-lain PAD yang sah	35.768.257.852,-	34.716.606.942,-
2015	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>363.978.160.111,-</b>	<b>424.937.346.938,-</b>
	Pajak Daerah	272.000.000.000,-	316.682.920.254,-
	Retribusi Daerah	40.495.709.448,-	35.281.817.931,-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	15.007.389.861,-	14.649.144.871,-
	Lain-lain PAD yang sah	36.475.060.800,-	58.323.463.881,-
2016	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>387.431.571.214,-</b>	<b>477.541.556.464,-</b>
	Pajak Daerah	301.000.000.000,-	374.641.673.419,-
	Retribusi Daerah	48.589.755.198,-	42.782.439.061,-
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	15.716.683.768,-	15.785.980.797,-
	Lain-lain PAD yang sah	22.125.132.247,-	44.331.463.186,-

Sumber: BPKAD Kota Malang, 2017

### 3. Total Penerimaan Dana Eksternal

Total Dana Eksternal merupakan dana yang diperoleh Daerah yang bersumber dari dana alokasi Pemerintah Pusat, Propinsi dan pinjaman yang dilakukan dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah. Total dana Eksternal yang diterima Pemerintah Kota Malang dari tahun 2013-2016 seperti pada tabel dibawah ini:

#### a. Dana Perimbangan

**Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Malang tahun 2013-2016**

TAHUN	JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
2013	Bagi Hasil Pajak	49.637.796.014,-	42.755.854.555,-
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	39.45.012.857,-	43.978.359.410,-
	Dana Alokasi Umum	746.686.937.000,-	746.686.937.000,-
	Dana Alokasi Khusus	30.315.710.000,-	30.315.710.000,-
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>866.094.455.871,-</b>	<b>863.736.860.965,-</b>
2014	Bagi Hasil Pajak	72.711.327.203,-	66.740.371.266,-
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	39.454.012.857,-	50.203.519.866,-
	Dana Alokasi Umum	808.447.825.000,-	808.447.825.000,-
	Dana Alokasi Khusus	31.304.060.000,-	31.304.060.000,-
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>951.917.225.060,-</b>	<b>956.695.776.132,-</b>
2015	Bagi Hasil Pajak	52.253.466.000,-	33.850.624.000,-
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	80.580.296.890,-	53.164.497.783,-
	Dana Alokasi Umum	818.758.893.000,-	818.758.893.000,-
	Dana Alokasi Khusus	21.842.860.000,-	20.590.560.000,-
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>973.435.515.890,-</b>	<b>926.364.574.783,-</b>
2016	Bagi Hasil Pajak	55.237.190.400,-	69.368.351.042,-
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	45.950.645.000,-	45.506.060.937,-
	Dana Alokasi Umum	859.678.208.000,-	859.678.208.000,-
	Dana Alokasi Khusus	156.172.620.100,-	94.813.827.000,-

	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.117.038.663.500,-</b>	<b>1.069.366.446.979,-</b>
--	-------------------------	----------------------------	----------------------------

Sumber: BPKAD Kota Malang, 2017

b. Lain-lain Pendapatan yang Sah

**Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Malang tahun 2013-2016**

<b>TAHUN</b>	<b>JENIS PENDAPATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
2013	Pendapatan Hibah	24.500.000.000,-	17.756.000.000,-
2013	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	106.204.436.102,-	109.145.826.273,-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	165.240.656.000,-	191.569.752.000,-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	24.865.145.000,-	24.865.145.000,-
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>320.810.237.102,-</b>	<b>343.336.723.273,-</b>
2014	Pendapatan Hibah	42.744.000.000,-	19.023.000.000,-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	129.611.285.742,-	154.505.481.231,-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	217.906.979.000,-	217.906.979.000,-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	44.188.057.000,-	44.188.057.000,-
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>434.450.321.742,-</b>	<b>435.623.517.231,-</b>
2015	Pendapatan Hibah	74.400.000.000,00	14.781.000.000,-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	154.505.481.231,-	152.348.658.410,-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	224.002.501.000,-	224.102.748.000,-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	86.536.953.000,-	86.536.953.000,-
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>539.444.935.231,-</b>	<b>477.769.359.410,-</b>
2016	Pendapatan Hibah	55.000.000.000,-	12.606.000.000,-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	165.652.848.135,-	171.619.907.266,-
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,-

	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5.275.580.000,00	5.260.340.000,-
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>230.928.428.135,00</b>	<b>194.486.247.266,-</b>

Sumber: BPKAD Kota Malang, 2017

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Penerimaan Pendapatan Daerah dan Dana Eksternal Kota

##### Malang

##### a. Analisis Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2016

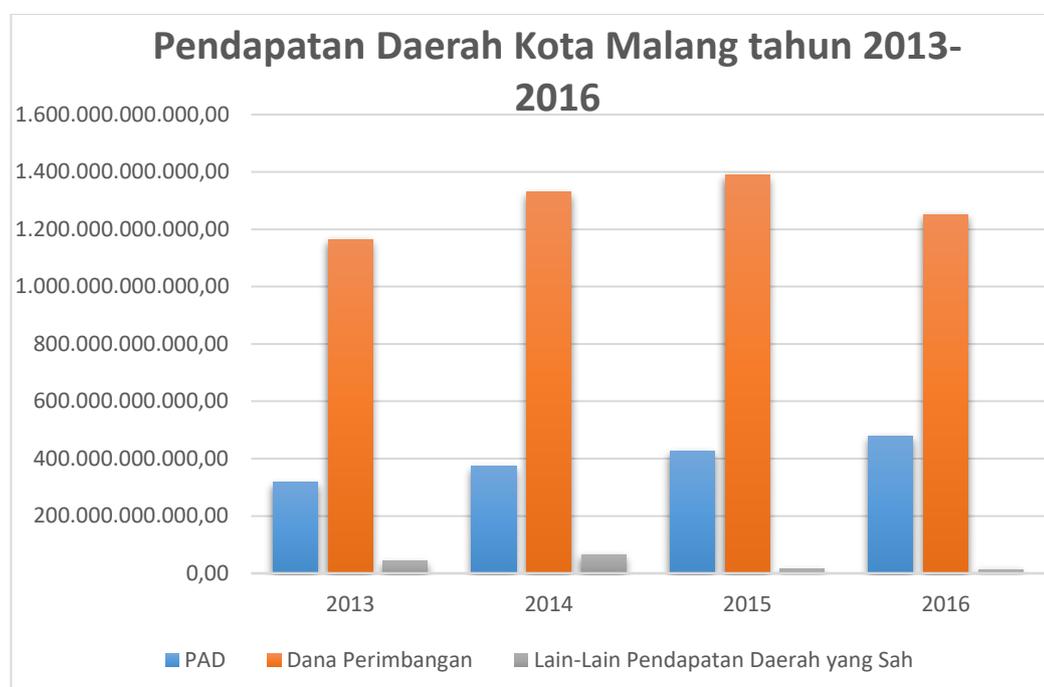
Pendapatan Daerah Kota Malang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Apabila dilihat dari Tabel 11 pendapatan yang mendominasi dalam Pendapatan Daerah Kota Malang adalah yang berasal dari Dana Perimbangan kemudian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan yang terakhir adalah PAD. Penerimaan pendapatan dari tiap-tiap komponen juga mengalami fluktuasi yang menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan daerah tidak masih tidak stabil.

**Tabel 9 Pendapatan Daerah Kota Malang tahun 2013-2016**

Tahun	Sumber Pendapatan Daerah			Total Pendapatan Daerah (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer & Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain pendapatan yang sah (Rp)	
2013	317.850.423.684,-	863.736.860.965,-	343.336.723.273,-	1.524.924.007.922,-
2014	372.550.096.292,-	956.695.776.132,-	435.623.517.231,-	1.764.869.389.655,-
2015	424.938.755.525,-	926.364.574.783,-	477.769.359.410,-	1.829.072.689.718,-
2016	477.541.556.464,-	1.069.366.446.979,-	194.486.247.266,-	1.741.394.250.709,-

Sumber. Laporan Realisasi Anggaran Kota Malang (Data Diolah, 2017)

Pada Tabel 9 juga dapat dilihat dalam bahwa total PAD tiap tahun selalu mengalami kenaikan. Tetapi jika dihitung selisih tiap tahun, kenaikan yang terjadi masih tidak stabil karena jumlahnya selisih antara tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan meskipun jumlahnya tidak begitu banyak. Secara berturut-turut selisih yang dapat dihitung berdasarkan data pada tabel 11 mulai dari tahun 2013-2014 adalah Rp 54.599.672.608,-; tahun 2014-2015 turun menjadi Rp 51.388.659.233,-; kemudiantahun 2015-2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 51.612.800.939,-. Kesimpulan yang dapat diambil dari kenaikan PAD tiap tahunnya adalah daerah telah berusaha menggali potensi-potensi pendapatan yang ada dalam daerahnya karena PAD yang didapat selalu naik tiap tahun, tetapi masih perlu berusaha keras lagi agar kenaikan penerimaan pendapatan yang terjadi terus bertambah dan stabil tiap tahunnya.



**Gambar 4 Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2016**  
 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Malang (Data Diolah, 2017)

Dana perimbangan merupakan pendapatan bersumber dari dana alokasi pemerintah pusat. Penerimaan dana perimbangan merupakan pendapatan yang mendominasi di dalam penerimaan pendapatan daerah. Berdasarkan pada tabel 11 kenaikan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan tiap tahunnya secara berturut-turut adalah Rp 92.958736.860,-; tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 30.331.201.349,-; kemudian di tahun 2015-2016 selisih yang terjadi kembali meningkat menjadi Rp 143.001.872.196,-. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan naik rata-rata tiap tahunnya, kenaikan yang dialami masih fluktuatif dan cenderung menurun. Bahkan pendapatan dana perimbangan sendiri mengalami penurunan di tahun 2015. Berarti ketergantungan daerah terhadap keuangan yang bersumber dari APBN secara tidak langsung menurun. Apabila daerah mampu mempertahankan hal tersebut, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat akan semakin menurun.

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang bersumber dari hibah; Dana Bagi Hasil (DBH); dana penyesuaian dan otonomi khusus; ataupun pinjaman dari pemerintah pusat/propinsi. Penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata memang mengalami kenaikan. Namun selisih yang ada cenderung berkurang. Secara berturut-turut perubahan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah pada tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar Rp 92.286.793.958; kemudian naik di tahun 2014-2015 sebesar Rp 42.145.842.179, dan di tahun 2015-2016 turun hingga sebesar Rp 283.283.112.144,-. Penyebab selisih yang sangat besar di tahun 2016 dari tahun 2015 adalah karena pada

komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

#### **b. Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013-2016**

Pendapatan Asli Daerah Kota Malang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah. Apabila dilihat dari tabel dapat diketahui PAD Kota Malang naik tiap tahunnya dengan kenaikan tertinggi terdapat pada tahun 2014. Secara berturut-turut kenaikan PAD dari tahun 2014 ke tahun 2016 adalah Rp 54.699.672.607,77; Rp 52.388.659.232,99; Rp 52.602.800.939,62. Tahun 2013, penyumbang PAD terbesar adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang kemudian disusul oleh retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dipungut oleh daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sumber PAD yang juga didapat dari pungutan selain pajak daerah adalah retribusi daerah.

**Tabel 10 Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013-2016**

2013	Pajak Daerah	238.499.748.161,-
	Retribusi Daerah	38.473.729.369,-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	16.571.050.907,-
	Lain-lain PAD yang sah	24.305.895.246,-
	<b>TOTAL PAD</b>	<b>317.850.423.684,-</b>
2014	Pajak Daerah	278.885.189.548,-
	Retribusi Daerah	45.557.675.300,-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	13.385.924.500,-
	Lain-lain PAD yang sah	34.721.306.942,-

**Lanjutan Tabel 10 Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013-2016**

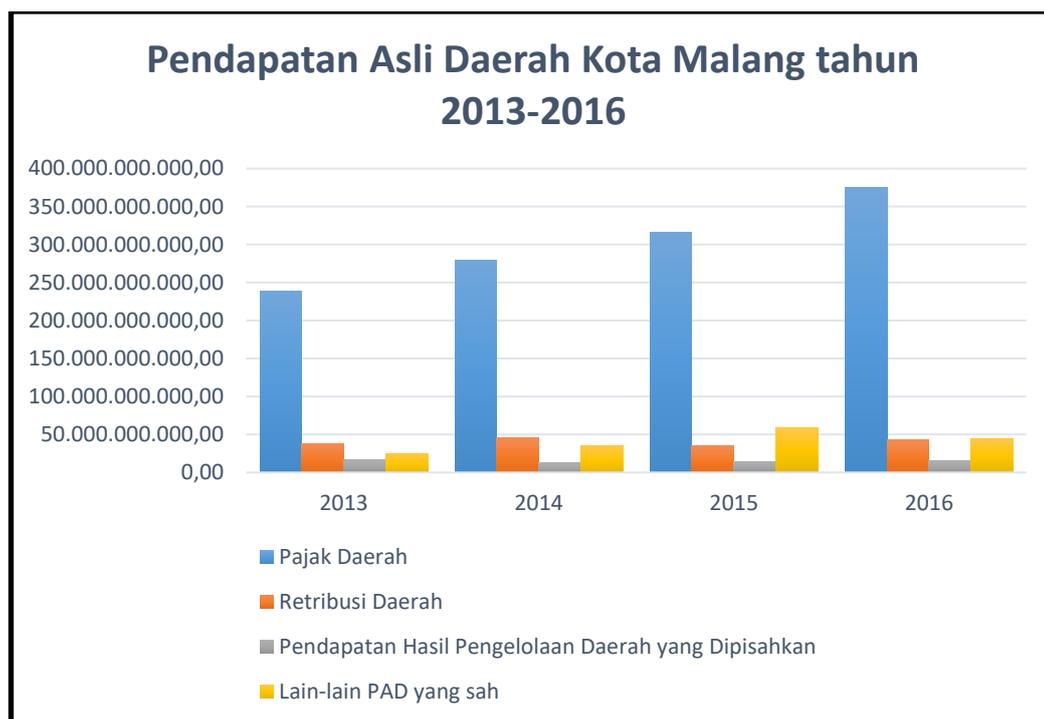
	TOTAL PAD	<b>372.550.096.292,-</b>
2015	Pajak Daerah	316.682.891.173,-
	Retribusi Daerah	35.281.817.931,-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	14.649.144.871,-
	Lain-lain PAD yang sah	58.324.901.549,-
	TOTAL PAD	<b>424.938.755.525,-</b>
2016	Pajak Daerah	374.641.673.419,-
	Retribusi Daerah	42.782.439.061,-
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	15.785.980.797,-
	Lain-lain PAD yang sah	44.331.463.186,-
	TOTAL PAD	<b>477.541.556.464,-</b>

Sumber: BPKAD Kota Malang (Data Diolah, 2017)

Tahun 2014, seluruh sumber PAD mengalami kenaikan yang menyebabkan PAD ikut naik. Pemberi sumbangan terbesar PAD tahun 2014 adalah pajak daerah, penyumbang kedua terbesar adalah retribusi daerah disusul lain-lain PAD yang sah kemudian hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Tahun 2015, PAD Kota Malang juga mengalami kenaikan dengan urutan penyumbang agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Jika tahun 2014 lain-lain PAD yang sah menempati urutan ketiga, kali ini berada di urutan kedua menggantikan retribusi daerah yang turun dikarenakan pendapatan retribusinya juga ikut turun. Tahun 2016, hampir sama dengan tahun sebelumnya namun hanya Pendapatan Lain-lain yang sah saja yang mengalami sedikit penurunan. Pajak daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2015 selalu memberikan sumbangan tertinggi diantara PAD yang lain.

Apabila dilihat dari sumber pendapatan lain-lain yang sah, beberapa sumber pendapatan dapat dikatakan tidak menentu tiap tahunnya. Contohnya pendapatan yang berasal dari penjualan asset daerah yang tidak dapat dipisahkan, dimana tidak setiap tahun daerah dapat menjual asset yang menghasilkan pendapatan yang sama atau bahkan meningkat tiap tahunnya. Begitu pula untuk pendapatan yang berasal

dari penerimaan jasa giro, rekening deposito, pendapatan denda dan lain-lain. Hal itu yang mendorong tidak stabilnya pendapatan dari lain-lain PAD yang sah. Pemerintah juga harus terus berusaha menggali pendapatan lain-lain tersebut, tentu juga agar tidak selalu menggantungkan pendapatannya hanya dari pajak daerah.



**Gambar 5 Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2013-2016**

Sumber: BPKAD Kota Malang (Data Diolah, 2017)

Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan yang berasal dari pungutan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber PAD yang diutamakan dalam mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah masih dapat terus digali, karena objek maupun subjek yang dipungut masih dapat terus bertambah berdasarkan peraturan daerah. Selain itu, dengan kebijakan-kebijakan mengenai tarif pemungutan juga masih dapat

dilakukan pemerintah daerah guna memicu perkembangan pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

## **2. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Rasio Kemandirian Daerah**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, untuk menghitung tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan rasio kemandirian daerah.

### **a. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah/Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)**

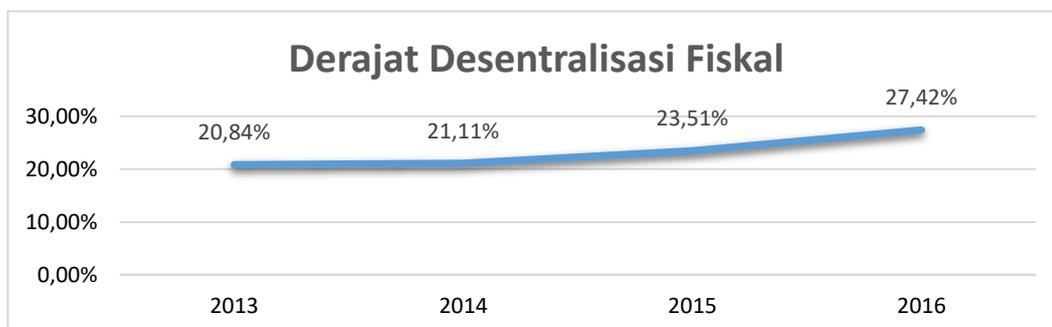
Dalam mengukur tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dalam mengukur tingkat kemandiran keuangan daerah dapat menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Derajat otonomi fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain (Radianto dalam Sistiana,2009:80). Pada perhitungan derajat desentralisasi fiskal, PAD dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Total penerimaan daerah sendiri antara lain terdiri dari PAD, dana perimbangan dan pajak daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut adalah hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF):

**Tabel 11 Perhitungan Presentase DDF**

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kontribusi
2013	317.850.423.684	1.524.924.007.922	20,84%
2014	372.550.096.292	1.764.869.389.655	21,11%
2015	424.938.755.525	1.829.072.689.718	23,23%
2016	477.541.556.464	1.741.394.250.709	27,42%

Sumber: BPKAD Kota Malang (Data Diolah,2017)



**Gambar 6 Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang tahun 2013-2016**

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan Gambar 6 diketahui bahwa, DDF Kota Malang selama 4 (empat) tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2016 secara berturut-turut adalah 20,84%; 21,11%; 23,51%; dan 27,42%. Hal tersebut menunjukkan presentase DDF Kota Malang sudah masih stagnan karena belum bisa meningkat secara signifikan dan masih dalam kategori yang sama yaitu sedang.

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa rasio kontribusi/DDF merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Pencapaian presentase DDF seperti ditampilkan pada Gambar 6 apabila diukur menggunakan skala interval DDF seperti pada Tabel 12 maka akan diperoleh hasil, tahun 2013 sedang; tahun 2014 sedang, tahun 2015 sedang dan tahun 2016 sedang. Namun meskipun di tahun-tahun tersebut kontribusi PAD naik tiap tahunnya, kontribusi PAD masih stagnan dalam kategori sedang. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah jika diasumsikan bahwa peningkatan presentase sebesar 2,19% tiap tahun, maka dapat disimpulkan bahwa kategori selanjutnya yaitu cukup baru akan dicapai dalam kurang lebih 5 tahun ke depan

Rasio Kontribusi atau DDF sangat ditentukan oleh penerimaan dari PAD tiap tahun. Unsur utama penerimaan PAD sendiri sangat dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Karena dua komponen tersebut merupakan komponen utama sebagai penyumbang terbesar dalam PAD. Jadi secara tidak langsung, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Malang juga dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil yang telah didapat, dapat disimpulkan bahwa Kota Malang telah berusaha meningkatkan PADnya, terlihat dari presentase DDF yang mengalami kenaikan meskipun masih dalam klasifikasi sedang. Peningkatan PAD akan terus terjadi apabila potensi sumber PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang berasal dari pungutan dan diutamakan dapat terus digali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menggali potensi pajak dan retribusi yang ada sekaligus meningkatkan PAD adalah dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

**a. Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Malang tahun 2013-2016**

Selain Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), untuk mengukur kemandirian daerah dapat menggunakan rumus rasio kemandirian daerah dengan membandingkan PAD dengan bantuan dana dan pinjaman pemerintah. Bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman yang dimaksud adalah pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Apabila sudah dilakukan perhitungan, yang kemudian dilakukan adalah mengukur hasilnya

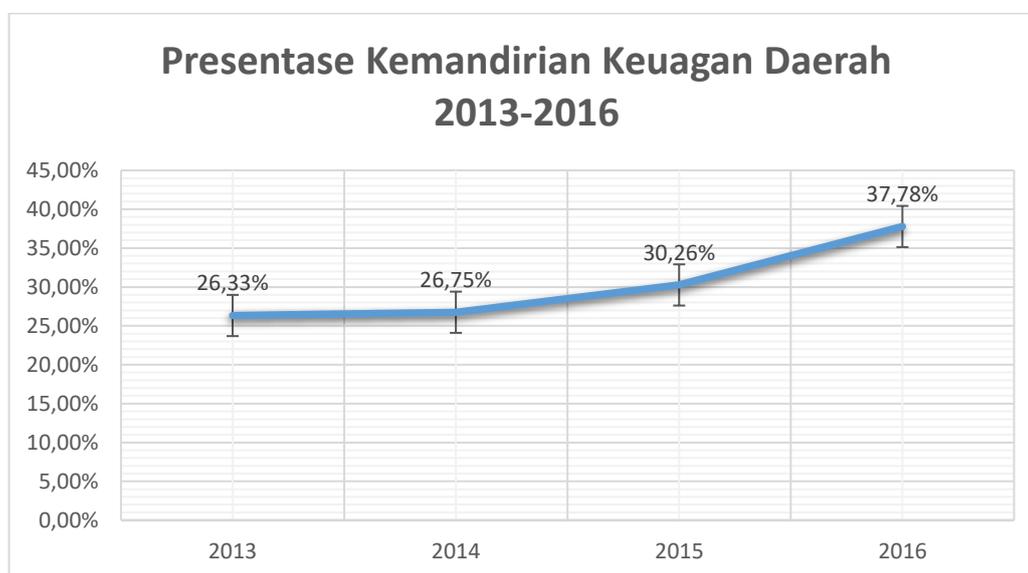
menggunakan skala presentase kemandirian keuangan daerah seperti pada Tabel 12.

**Tabel 12 Perhitungan Presentase Kemandirian Kota Malang 2013-2016**

Tahun	PAD (Rp)	Bantuan Dana dan Pinjaman (Rp)	Presentase Kemandirian
2013	317.850.423.684,-	1.207.073.584.238,-	26,33%
2014	372.550.096.292,-	1.392.319.293.363,-	26,76%
2015	424.938.755.525,-	1.404.133.934.193,-	30,26%
2016	477.541.556.464,-	1.263.852.694.245,-	37,78%

Sumber: BPKAD Kota Malang (Data Diolah, 2017)

Berdasarkan Gambar 7 Diketahui bahwa presentase rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang selama tahun 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami kenaikan. Presentase rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang yang terendah adalah 26,33% pada tahun 2013 dan yang tertinggi sebesar 37,78%.



**Gambar 7 Presentase Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2013-2016**

Sumber: BPKAD Kota Malang (Data Diolah, 2017)

PAD merupakan pendapatan yang benar-benar diperoleh dari kemampuan serta potensi yang benar-benar ada dalam suatu daerah, sehingga PAD akan sangat

mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Didalamnya, terdapat pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama PAD. Jadi penerimaan pendapatan pajak dan retribusi secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah Kota Malang karena semakin tinggi penerimaan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, maka rasio tingkat kemandirian daerah Kota Malang akan semakin meningkat.

Berdasarkan presentase rasio kemandirian keuangan daerah Kota Malang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Malang membentuk pola konsultatif karena rata-rata telah melebihi 25%. Pola hubungan konsultatif menurut Halim (2002:169) berarti peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah. Terlebih penyumbang kontribusi PAD yang diutamakan yaitu pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah telah masuk dalam klasifikasi yang baik dalam kontribusinya terhadap PAD.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah dengan menggunakan rumus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Kota Malang memiliki kontribusi PAD yang masuk dalam klasifikasi sedang. Artinya kontribusi PAD masih belum begitu besar dan kemampuan keuangan daerah Kota Malang dalam menyelenggarakan desentralisasi juga masih dalam kategori sedang dan masih perlu meningkatkan lagi PADnya. Semakin tinggi rasio kontribusi PAD maka semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2010:142)

Pemerintah Kota Malang perlu lebih meningkatkan lagi PADnya. Terutama dengan menggali potensi dari pajak daerah dan retribusi daerah karena dua komponen PAD tersebut merupakan sumber pendapatan yang utama dalam suatu daerah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah salah satunya adalah dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

Secara umum konsep peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

a. Upaya Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada. Sedangkan ekstensifikasi pajak menurut Soemitro (1988:384) adalah : Perluasan pemungutan pajak dalam arti :

- 1) Penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru
- 2) Menciptakan pajak-pajak baru, atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada.

b. Upaya Intensifikasi

Intensifikasi memiliki makna penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Adapun langkah-langkah intensifikasi, berdasarkan Sari Kajian Fiskal dan Moneter (1996:39) dimaksudkan untuk mengefektifkan pemungutan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang sudah dikenakan sebelumnya dengan memberikan kegiatan

penerangan, penyuluhan dan sosialisasi pajak lainnya. Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah

- 1 memperluas basis penerimaan
  - 2 memperkuat proses pemungutan
  - 3 meningkatkan pengawasan
  - 4 meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
  - 5 meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
- (Sidik dalam yuswanti, 2008:61-61)

Kemandirian keuangan daerah yang telah digambarkan sebelumnya menunjukkan bahwa, dengan rasio kemandirian maka didapat hasil Kota Malang sudah membentuk pola hubungan konsultatif. Pola hubungan konsultatif berarti peranan pemerintah daerah telah lebih dominan dan peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerahnya (Halim,2002:169).

Berdasarkan hasil pembahasan yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD yang masih stagnan berada di kisaran 20,01-30,00% dan masuk dalam kategori sedang. Rasio kemandirian daerah juga bisa dikatakan stagnan karena masih berada di pola hubungan konsultatif. Apabila diasumsikan pendapatan daerah selain pendapatan pajak daerah tetap dan rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD tetap, maka pola hubungan partisipatif atau kemandirian keuangan daerah tidak akan tercapai bahkan hingga 10 tahun ke depan. Kemampuan peningkatan PAD tidak hanya dilihat dari apakah realisasi pendapatan

tersebut telah melampaui target tetapi dilihat dari besarnya realisasi PAD itu sendiri yang kemudian dibandingkan dengan total seluruh pendapatan daerah.

Kota Malang akan membentuk pola delegatif atau mandiri dan dianggap mampu meningkatkan PADnya dengan baik adalah saat besarnya realisasi PAD lebih besar dari total pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Untuk menuju tingkat kemandirian yang lebih baik dan menjadi pola hubungan delegatif atau menjadi daerah yang mandiri baru akan terwujud setelah lebih dari 10 tahun dengan pendapatan lain selain pajak daerah adalah tetap tiap tahunnya. Dengan asumsi apabila pola pertumbuhan rata-rata tiap tahun tingkat kemandirian daerah tetap sebesar 5% per tahun. Sedangkan pertumbuhan rata-rata kemandirian daerah Kota Malang tiap tahun hanya sebesar 3,82%. Pola hubungan delegatif sendiri adalah dimana sudah tidak ada campur tangan pemerintah pusat karena daerah sudah benar-benar mandiri dan dapat menjalankan otonominya.